



NEWSLETTER PUSDATIN

Daftar Isi

- Membaca Arah PDB Tanaman Pangan: Seberapa Besar Peran Padi dan Jagung dalam Ekonomi Pertanian?, Halaman 1
- Pusdatin Kementan Percepat Penyusunan Arsitektur SPBE Selaras dengan Pemerintah Digital Nasional, Halaman 3
- Pusdatin Kementan Perkuat Ketahanan Siber Melalui Koordinasi Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Nasional, Halaman 5
- Membangun Kesadaran Digital: Peran Strategis Aplikasi dalam Peningkatan Indeks Pemerintah Digital Kementan, Halaman 7
- Dari Data Lapangan ke Penyaluran Tepat Sasaran: Peran e-Banper dan Simluhtan dalam Ekosistem Digital Kementan, Halaman 8
- Akurasi Data Pertanian Diperkuat: Groundcheck SIMOTANDI di Kecamatan Rangkasbitung, Cihara, dan Cigemplong, Halaman 9

Mohon Kesediaannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan



<https://bit.ly/surveipusdatinkementan>

Membaca Arah PDB Tanaman Pangan: Seberapa Besar Peran Padi dan Jagung dalam Ekonomi Pertanian?

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dan daya saing komoditas pertanian agar mampu memperkuat kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, seberapa besar sebenarnya peran produksi komoditas utama dalam membentuk nilai tambah sektor ini? Salah satu cara menjawabnya adalah dengan melihat hubungan antara produksi dan Nilai Tambah Bruto (NTB), yaitu nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas produksi. Dalam konteks pertanian, NTB menjadi indikator penting untuk mengukur kontribusi riil sektor ini terhadap perekonomian nasional.

Dalam perhitungan resmi, PDB sektor pertanian mencakup berbagai subsektor, mulai dari tanaman pangan hingga perikanan dan kehutanan. Namun, karena fokus kebijakan Kementerian Pertanian tidak mencakup kehutanan dan perikanan, analisis ini menggunakan pendekatan "PDB Pertanian Sempit", yaitu sektor pertanian tanpa dua subsektor tersebut.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian

Redaktur:
Kepala Bagian Umum

Editor:
Roydatul Zikria, S.Si., M.S.E
Dr. Nugroho Setyabudhi, S.Kom., MM
Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si
Suyati, S.Kom
Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Lilik Wulaningtyas, S.Kom

Fotografer:
Sri Lestari, SE
Iswadi

Desain Grafis:
Dhanang Susatyo, SE
Muchammad Eko Darwanto, ST

Sekretariat:
Rizky Purnama R, S.Kom
Didik Pratama Saputra, S.Kom
Rahma Andany, S.Kom
Yusri Ardi, S.Kom
Marwati
Priatna Sari
Aryo Wicaksono, S.Kom., M.M.

Alamat Redaksi

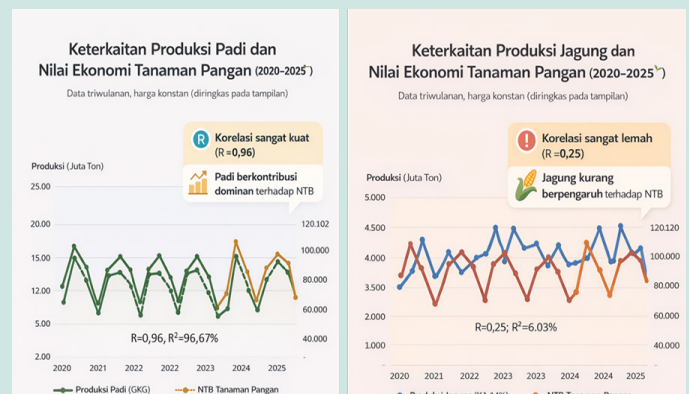


**PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI PERTANIAN**
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,
Ragunan - Jakarta 12550
Telp : 021- 7822638
e-mail : layanan.data@pertanian.go.id

Pendekatan yang digunakan adalah PDB harga konstan (tahun dasar 2010), sehingga perubahan yang terlihat benar-benar mencerminkan dinamika produksi, bukan fluktuasi harga.

Hasil analisis menunjukkan fakta yang sangat menarik, dimana produksi padi memiliki hubungan yang sangat kuat dan searah dengan NTB subsektor tanaman pangan. Dengan nilai korelasi mencapai 0,96, hubungan ini dapat dikategorikan sangat erat. Bahkan, kontribusi produksi padi terhadap pembentukan NTB tanaman pangan mencapai sekitar 96,97%. Artinya, hampir seluruh pergerakan nilai tambah di subsektor ini ditentukan oleh produksi padi.

Temuan ini menegaskan bahwa padi bukan sekadar komoditas pangan utama, tetapi juga menjadi penggerak utama kinerja ekonomi subsektor tanaman pangan. Dengan kata lain, ketika produksi padi meningkat, NTB tanaman pangan hampir pasti ikut terdorong naik. Implikasinya cukup jelas, tren produksi padi dapat digunakan sebagai indikator kuat untuk memprediksi kinerja NTB tanaman pangan ke depan.



Ilustrasi Keterkaitan Produksi Padi dan Jagung dengan Nilai Tambah Bruto Sub Sektor Tanaman Pangan

Berbeda dengan padi yang terbukti menjadi penggerak utama nilai ekonomi, produksi jagung justru tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) subsektor tanaman pangan. Nilai korelasi hanya sekitar 0,25, dengan kontribusi terhadap NTB sebesar 6,03%. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi produksi jagung tidak banyak memengaruhi perubahan nilai tambah subsektor tanaman pangan secara keseluruhan. Dengan demikian, jagung belum dapat dijadikan indikator

utama dalam membaca arah NTB tanaman pangan.

Hal ini tidak berarti jagung tidak penting, melainkan kontribusinya dalam pembentukan nilai tambah relatif lebih kecil dan tidak dominan untuk sektor pertanian. Sebagian besar pemanfaatan jagung berada di sektor hilir, sehingga nilai tambah yang dihasilkan banyak tercipta di sektor lain seperti industri pakan ternak, makanan olahan dan lainnya. Nilai tambahnya tidak sepenuhnya tercatat dalam subsektor tanaman pangan.

Selain itu, fluktuasi produksi jagung yang cenderung tidak sejalan dengan pergerakan NTB, serta skala usaha yang umumnya masih terbatas, membuat kontribusinya terhadap kinerja ekonomi subsektor ini menjadi kurang terlihat. Dalam konteks ini, peran jagung lebih bersifat pelengkap, sementara padi tetap menjadi penopang utama dalam pembentukan nilai ekonomi tanaman pangan.

Temuan ini memberikan pesan penting bagi perumusan kebijakan, dimana fokus pada padi tetap relevan, karena dampaknya langsung terhadap kinerja ekonomi subsektor tanaman pangan. Sementara itu diversifikasi komoditas perlu diperkuat, terutama untuk meningkatkan peran komoditas lain seperti jagung agar kontribusinya terhadap NTB semakin signifikan. Pemanfaatan data produksi sebagai alat prediksi dapat membantu perencanaan yang lebih presisi, khususnya dalam menjaga stabilitas PDB sektor pertanian.

Selama ini, produksi sering dilihat hanya sebagai indikator ketersediaan pangan. Namun, analisis ini menunjukkan bahwa produksi terutama padi, juga menjadi kunci dalam menggerakkan nilai ekonomi sektor pertanian. Ke depan, tantangannya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kenaikan produksi mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Penulis: Sabarella

Pusdatin Kementan Percepat Penyusunan Arsitektur SPBE Selaras dengan Pemerintah Digital Nasional

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) terus mempercepat penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendukung transformasi menuju Pemerintahan Digital nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi yang berlangsung di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Kementan dalam menyelaraskan arsitektur SPBE internal dengan kebijakan Pemerintah Digital nasional yang tengah mengalami pembaruan. Tim Pusdatin Kementan yang terdiri dari 10 orang hadir dalam kegiatan tersebut, mewakili Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi, Tim Kerja Keamanan Siber, serta Tim Kerja Tata Kelola dan Pelindungan Data Pribadi (PDP). Tim ini dipimpin oleh Teuku Ardhianzah Dewantara Silang selaku Ketua Kelompok Keamanan Siber dan PDP.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Pusdatin Kementan diterima oleh Tim dari Kedeputan Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB berjumlah 5 orang yang dipimpin oleh Muthia Nur Rachmayanti selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama dari Keasdepan Manajemen Transformasi Digital Pemerintah. Muthia bertindak sebagai pimpinan rapat dan memandu jalannya diskusi strategis terkait arah kebijakan Pemerintah Digital.



Peserta kegiatan koordinasi Percepatan Penyusunan Arsitektur SPBE, Tim KemenPANRB dipimpin Muthia Nur Rachmayanti (ketujuh dari kanan) dan Tim Pusdatin dipimpin oleh Teuku Ardhianzah (kelima dari kanan) di Kantor KemenPANRB (21/04/2026).

Muthia dalam arahannya menekankan bahwa transformasi digital pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari setiap instansi. “Kunci dari Pemerintahan Digital adalah kolaborasi dan keselarasan. Setiap kementerian dan lembaga perlu memastikan bahwa arsitektur yang disusun tidak berjalan sendiri, tetapi terhubung dengan ekosistem nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat”, ungkapnya.

Sementara itu, Ardhianzah menegaskan pentingnya keselarasan antara arsitektur digital instansi dengan arah kebijakan nasional. “Penyusunan arsitektur SPBE tidak lagi sekadar memenuhi dokumen administratif, tetapi harus menjadi blueprint terpadu yang mampu mendorong integrasi layanan, efisiensi proses, dan peningkatan kualitas layanan publik”, ujarnya dalam kegiatan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, tim Pusdatin bersama KemenPAN-RB membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus utama kegiatan. Diskusi diawali dengan konsultasi terkait penyelarasan Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian dengan Arsitektur SPBE Nasional. Selanjutnya, pembahasan berlanjut pada identifikasi berbagai hambatan teknis yang dihadapi dalam proses pengisian dan pelaporan arsitektur melalui Aplikasi SIA SPBE. Agenda terakhir menyoroti kriteria serta pemenuhan eviden dalam evaluasi kinerja Pemerintah Digital yang akan diterapkan secara lebih komprehensif.

Pembahasan tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan kesiapan Kementan menghadapi perubahan kebijakan dan sistem evaluasi digital yang baru. Salah satu poin penting yang mengemuka adalah perubahan paradigma dari SPBE menuju Pemerintahan Digital. Pemerintah tengah melakukan rebranding kebijakan melalui pembaruan regulasi, termasuk penggantian kebijakan lama dengan pendekatan yang lebih terintegrasi berbasis layanan. Dalam konsep baru ini, arsitektur tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, melainkan sebagai kerangka kerja strategis yang menghubungkan berbagai

sistem, data, dan layanan lintas instansi.

Selain itu, diperkenalkan pula pendekatan arsitektur berlapis yang terdiri dari arsitektur makro, meso, dan mikro. Arsitektur makro berada pada tingkat nasional, arsitektur meso mencakup layanan lintas instansi yang bersifat prioritas, sementara arsitektur mikro berada pada tingkat kementerian atau lembaga. Kementan diharapkan mampu mengadopsi arsitektur meso yang relevan ke dalam arsitektur mikro agar tercipta keselarasan dan interoperabilitas sistem.

Diskusi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-pengampu layanan dalam penyusunan arsitektur. Proses ini dilakukan melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, tergantung pada kesiapan masing-masing instansi. Dalam hal ini, Pusdatin berperan sebagai leading sector teknis yang mengoordinasikan penyusunan arsitektur bersama unit kerja terkait.

Di sisi teknis, tim Pusdatin mengidentifikasi sejumlah kendala dalam penggunaan aplikasi SIA SPBE, terutama dalam proses penginputan dan pelaporan data arsitektur. Beberapa objek arsitektur dilaporkan tidak terbaca dalam sistem akibat perbedaan status atau versi data. Selain itu, terdapat kendala performa sistem saat melakukan *generate* laporan dan diagram arsitektur.

Menanggapi hal tersebut, Ardhianzah menekankan perlunya perbaikan kualitas data dan koordinasi lintas unit kerja. “Kami melihat bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada sistem, tetapi juga pada konsistensi dan kualitas input data. Oleh karena itu, kolaborasi antar-unit menjadi kunci untuk memastikan arsitektur yang disusun benar-benar akurat dan dapat dimanfaatkan”, jelasnya.

Selain pembahasan arsitektur, kegiatan ini juga membahas mekanisme evaluasi Pemerintah Digital yang akan diterapkan mulai tahun 2026. Evaluasi ini mengalami penyederhanaan signifikan, dari sebelumnya 47 indikator menjadi 20 indikator yang terbagi dalam tujuh aspek utama. Penilaian difokuskan pada dampak

layanan, bukan sekadar kelengkapan dokumen atau kebijakan.

Pemerintah juga merencanakan penerapan sistem evaluasi yang lebih fleksibel dan bersifat on-demand mulai tahun 2027, di mana instansi dapat mengajukan penilaian kapan saja sepanjang tahun. Selain itu, sebagian indikator akan diambil langsung dari hasil evaluasi lain, seperti Indeks Satu Data Indonesia (SDI) dari Kementerian PPN/Bappenas, Indeks Jaringan Informasi Geospasial (JIG) dari Badan Informasi Geospasial, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari Badan Pusat Statistik, dan Indeks Instrumen Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga mengurangi beban administrasi instansi.

Dalam konteks keamanan informasi, pembahasan juga mencakup penerapan kriptografi dan pengukuran tingkat kematangan keamanan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BSSN. Nilai dari sistem IKASANDI nantinya akan menjadi acuan langsung dalam evaluasi keamanan Pemerintah Digital.

Kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi tindak lanjut bagi Kementan. Di antaranya adalah perhitungan erlunya pembaruan status data arsitektur dalam aplikasi SIA agar dapat dalam rekapitulasi, serta pentingnya pemetaan layanan internal yang termasuk dalam arsitektur meso. Selain itu, Kementan juga diimbau untuk segera menyiapkan bukti dukung bagi indikator evaluasi Pemerintah Digital yang akan dimulai pada pertengahan tahun 2026.

Ardhianzah menambahkan bahwa kesiapan menghadapi evaluasi menjadi bagian penting dari transformasi digital. "Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi juga menjadi alat untuk mengukur sejauh mana kita mampu memberikan layanan digital yang berdampak nyata bagi masyarakat", katanya.

Dengan adanya percepatan penyusunan arsitektur SPBE yang selaras dengan

kebijakan nasional, Kementan diharapkan mampu memperkuat fondasi transformasi digitalnya. Langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga mendukung terciptanya layanan publik yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Kementan dalam mendukung agenda besar Pemerintah Digital Indonesia. Melalui sinergi antara kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia, transformasi digital di sektor pertanian diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan nasional.

Penulis: Nugroho Setyabudhi

Pusdatin Kementan Perkuat Ketahanan Siber Melalui Koordinasi Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Nasional

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan siber nasional dengan berpartisipasi aktif dalam Forum Koordinasi Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian/lembaga strategis.



Sambutan Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Drs. Nugroho Sulistyo Budi pada Forum Koordinasi Pelindungan IIV Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan di Auditorium BSSN Depok (14/04/2026).

Delegasi Pusdatin Kementan dipimpin oleh Teuku Ardhianzah Dewantara Silang selaku

Ketua Kelompok Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi (PDP), didampingi Muhammad Shafari Rahmat sebagai Ketua Tim Kerja Keamanan Siber dan Yenni Tat sebagai Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan PDP. Kehadiran tim ini menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Drs. Nugroho Sulistyو Budi, yang dalam sambutannya menyoroti peningkatan signifikan ancaman siber di tingkat nasional. Ia mengungkapkan bahwa hingga April 2026, telah terdeteksi lebih dari 1,48 miliar anomali serangan siber, meningkat drastis hingga 714 persen dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir.

“Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam komunikasi dan informasi, namun di sisi lain juga membuka peluang bagi pihak tidak berwenang untuk melakukan serangan. Saat ini, ancaman tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berkembang menjadi perang asimetrik yang memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan”, ujar Nugroho.

Forum ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam melindungi Infrastruktur Informasi Vital, yang merupakan sistem elektronik strategis dengan dampak besar terhadap stabilitas pemerintahan, pelayanan publik, dan pertahanan negara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan, meningkatkan ketahanan siber nasional, serta memastikan keberlangsungan layanan kritis pemerintah.

Dalam sesi *keynote speech*, Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menegaskan bahwa transformasi digital yang masif telah meningkatkan ketergantungan pemerintah terhadap sistem elektronik, sekaligus memperbesar risiko ancaman siber. Ia menekankan bahwa tantangan utama saat ini bukan pada ketersediaan regulasi, melainkan

pada implementasi dan integrasi antar instansi. “IIV menjadi tulang punggung layanan negara. Ketika sistem ini terganggu, dampaknya tidak hanya teknis, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, hingga kondisi politik nasional”, jelasnya.

Sementara itu, sebagai keynote speaker kedua, akademisi dan analis pertahanan Dr. Andi Widjajanto mengingatkan bahwa dunia telah memasuki era baru yang disebut sebagai “*First AI War*”, di mana kecerdasan buatan menjadi faktor utama dalam dinamika ancaman global. Ia menilai Indonesia berada dalam posisi strategis yang rentan terhadap serangan siber berbasis AI.

“Dalam lanskap ancaman berbasis AI, posisi netral tidak menjamin keamanan. Kita harus bertransformasi dari pendekatan defensif-pasif menjadi defensif-aktif untuk menjaga kedaulatan digital”, tegas Andi.

Dalam sesi narasumber, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN, Marsma TNI Chairul Akbar Hutasuhut, memaparkan peran strategis BSSN sebagai regulator, mitra, dan pengawas dalam pelindungan IIV. Ia menjelaskan bahwa pendekatan pelindungan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proteksi, deteksi, hingga penanggulangan dan pemulihan insiden siber.

“Pelindungan IIV tidak cukup hanya dengan teknologi. Dibutuhkan integrasi antara kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor agar ketahanan siber nasional dapat terwujud secara berkelanjutan”, ujarnya.

Selain itu, sebagai narasumber kedua, Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen TNI J.O. Sembiring, menyoroti pentingnya kedaulatan siber sebagai bagian dari pertahanan negara. Ia menjelaskan bahwa kedaulatan siber mencakup kemampuan negara dalam mengatur, melindungi, dan mengendalikan ruang siber nasional dari berbagai ancaman.

“Kedaulatan siber tidak hanya soal teknologi, tetapi juga mencakup perlindungan data, penguatan infrastruktur digital, dan ketahanan

kognitif terhadap disinformasi dan propaganda”, ungkapinya.

lajugamenambahkanbahwastrategipertahanan siber TNI mengedepankan pendekatan proaktif melalui deteksi dini, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem pertahanan yang terintegrasi.

Di sisi lain, partisipasi Pusdatin Kementan dalam forum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kesiapan sektor pertanian menghadapi ancaman siber. Berdasarkan hasil verifikasi BSSN tahun 2025, sistem elektronik Kementan belum termasuk dalam kategori IIV. Namun demikian, upaya peningkatan kapasitas tetap dilakukan melalui pelatihan teknis, simulasi keamanan (*cyber drill*), serta pengukuran tingkat kematangan keamanan siber melalui indikator Instrumen Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI).

Forum ini juga membahas mekanisme terbaru dalam pengukuran kematangan keamanan siber melalui IKASANDI, yang pada tahun 2026 akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi sebelum diverifikasi oleh BSSN. Nilai IKASANDI ini nantinya akan menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi Pemerintah Digital.

Secara keseluruhan, forum menyimpulkan bahwa perlindungan Infrastruktur Informasi Vital merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas nasional di era digital. Diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup penguatan regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat.

Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan koordinasi nasional melalui pembentukan pusat respons siber terpadu, peningkatan standar keamanan pada infrastruktur kritis, serta pengembangan kapasitas deteksi dan respons berbasis kecerdasan buatan.

Dengan meningkatnya kompleksitas ancaman siber, transformasi menuju pendekatan yang lebih proaktif menjadi kebutuhan mendesak

Kementan melalui Pusdatin berkomitmen untuk terus beradaptasi dan memperkuat ketahanan digitalnya, sebagai bagian dari kontribusi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan siber nasional.

Melalui sinergi antara pemerintah, sektor pertahanan, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia diharapkan mampu membangun ekosistem keamanan siber yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berkembang

Penulis: Nugroho Setyabudhi

Membangun Kesadaran Digital: Peran Strategis Aplikasi dalam Peningkatan Indeks Pemerintah Digital Kementan

Upa transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertanian terus bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan terukur. Salah satu momentum penting yang perlu menjadi perhatian bersama adalah penguatan peran aplikasi sistem informasi dalam mendukung peningkatan Indeks Pemerintah Digital (PemDi). Hal ini semakin mengemuka setelah dilaksanakannya koordinasi dengan Kementerian PANRB yang memberikan penajaman terhadap indikator-indikator penilaian, khususnya pada domain aplikasi.

Selama ini, aplikasi sering kali dipahami sebatas sebagai alat bantu kerja atau bahkan hanya sebagai pelengkap administrasi. Padahal, dalam kerangka PemDi, aplikasi memiliki peran yang jauh lebih strategis. Aplikasi menjadi representasi langsung dari bagaimana proses bisnis dijalankan secara digital, seberapa efisien layanan diberikan, serta sejauh mana data dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, kualitas aplikasi mencerminkan tingkat kematangan transformasi digital suatu instansi.

Hasil koordinasi menunjukkan bahwa penilaian tidak lagi berfokus pada jumlah aplikasi yang dimiliki, melainkan pada kualitas implementasinya. Aplikasi yang dinilai baik adalah yang benar-benar digunakan, terintegrasi dengan sistem lain, dan mampu mendukung layanan secara nyata. Kondisi di mana banyak aplikasi berdiri sendiri tanpa keterkaitan satu

sama lain justru menjadi catatan yang perlu diperbaiki. Fenomena silo aplikasi ini tidak hanya menghambat efisiensi, tetapi juga berdampak pada kualitas data yang dihasilkan.

Di sinilah pentingnya membangun kesadaran bersama di seluruh unit kerja. Setiap pengelola aplikasi perlu mulai melihat sistem yang dikembangkan bukan sebagai milik unit semata, melainkan sebagai bagian dari ekosistem digital Kementan secara keseluruhan. Integrasi menjadi kata kunci. Aplikasi yang terhubung akan mempermudah aliran data, mengurangi duplikasi, dan membuka peluang inovasi layanan yang lebih luas.

Tidak kalah penting adalah pengelolaan data yang terintegrasi. Data yang tersebar dan tidak sinkron sering kali menjadi penghambat dalam penyusunan kebijakan yang cepat dan tepat. Melalui pendekatan integrasi data, diharapkan setiap informasi yang dihasilkan dapat menjadi sumber kebenaran bersama yang dapat dimanfaatkan lintas unit kerja. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait tata kelola data pemerintah.

Sementara itu, keberadaan portal layanan menjadi wajah utama dari transformasi digital yang sedang dibangun. Portal tidak hanya berfungsi sebagai gerbang akses, tetapi juga sebagai simbol kemudahan dan keterbukaan layanan kepada pengguna. Ketika aplikasi dan data telah terintegrasi dengan baik, portal layanan akan mampu menghadirkan pengalaman yang lebih sederhana, cepat, dan responsif.

Keseluruhan upaya ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yaitu peningkatan nilai Indeks Pemerintah Digital Kementerian Pertanian. Namun lebih dari sekadar angka, PemDi sejatinya adalah cerminan dari perubahan cara kerja dari yang sebelumnya terfragmentasi menjadi terintegrasi, dari yang manual menjadi digital, dan dari yang berorientasi proses menjadi berorientasi layanan.

Momentum ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital bukan hanya tanggung jawab tim IT, tetapi merupakan kerja bersama seluruh unit di Kementan. Dengan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan semua pihak, diharapkan setiap aplikasi yang dikembangkan tidak hanya berfungsi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kinerja organisasi dan

kualitas layanan publik.

Sudah saatnya aplikasi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai enabler utama dalam mewujudkan birokrasi yang modern, efektif, dan adaptif terhadap perubahan.

Penulis: Lilik Wulaningtyas

Dari Data Lapangan ke Penyaluran Tepat Sasaran:

Peran e-Banper dan Simluhtan dalam Ekosistem Digital Kementan

Transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertanian semakin menunjukkan arah yang jelas, khususnya dalam pengelolaan bantuan pemerintah. Melalui penguatan aplikasi e-Banper yang terintegrasi dengan sistem data pertanian seperti Simluhtan, proses penyaluran bantuan kini tidak lagi hanya bergantung pada administrasi manual, tetapi bertumpu pada data yang berasal langsung dari lapangan.

Alur pengelolaan bantuan dimulai dari hulu, yakni oleh para penyuluh pertanian yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan petani. Melalui Simluhtan, penyuluh melakukan input data calon penerima bantuan secara lebih sistematis, mencakup identitas petani atau kelompok tani, kondisi lahan, hingga kebutuhan yang diusulkan. Tidak hanya itu, aspek spasial juga mulai diperkuat dengan memasukkan data peta lokasi wilayah yang akan menerima bantuan. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan riil di lapangan.

Data yang telah dihimpun tersebut kemudian menjadi dasar dalam pengajuan bantuan melalui e-Banper. Pada tahap ini, kualitas dan kelengkapan data menjadi sangat menentukan. Sistem tidak hanya berfungsi sebagai tempat penginputan, tetapi juga sebagai alat kontrol yang memastikan setiap usulan dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.

Proses berikutnya adalah tahapan verifikasi berjenjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Balai Riset dan Pengembangan (BRMP) hingga unit Eselon I terkait. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap usulan bantuan telah melalui proses validasi yang memadai, baik dari sisi teknis, kebutuhan program, maupun kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Dengan dukungan sistem digital, proses verifikasi menjadi lebih transparan dan terdokumentasi, sehingga meminimalkan potensi kesalahan maupun duplikasi data.

Integrasi antara e-Banper dan Simluhtan ini menjadi contoh nyata bagaimana aplikasi tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam satu ekosistem digital. Data yang diinput oleh penyuluh di lapangan dapat langsung mengalir ke dalam proses perencanaan dan penyaluran bantuan, tanpa harus melalui proses manual yang berulang. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan.

Lebih jauh, pendekatan ini juga mendukung prinsip “data sebagai fondasi kebijakan”. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, Kementerian Pertanian memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan prioritas program, mengevaluasi efektivitas bantuan, serta merancang intervensi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Keberhasilan implementasi e-Banper yang terintegrasi dengan Simluhtan tentu tidak lepas dari peran aktif seluruh pihak yang terlibat. Penyuluh sebagai penginput data, pengelola sistem di unit kerja, hingga tim verifikator di tingkat pusat memiliki kontribusi yang sama pentingnya. Setiap data yang dimasukkan dan setiap proses yang dijalankan akan berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan semakin kuatnya integrasi ini, e-Banper tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga menjadi jembatan antara kondisi riil di lapangan dengan kebijakan di tingkat pusat. Inilah wujud nyata transformasi digital yang tidak hanya memperbaiki proses, tetapi juga memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Penulis: Lilik Wulaningtyas



Akurasi Data Pertanian Diperkuat: *Groundcheck* SIMOTANDI di Kecamatan Rangkasbitung, Cihara, dan Cigemblong

Langkah Nyata Menuju Swasembada Pangan

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian terus melakukan berbagai inovasi berbasis data. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah kegiatan verifikasi pertanaman padi melalui *groundcheck* SIMOTANDI di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. *Groundcheck* pada periode pengamatan pertanaman padi 26 Maret s/d 6 April 2026.



Kelompok Data Komoditas (Pusdatin) melakukan koordinasi ke Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Rangkasbitung

Kegiatan *groundcheck* ini berlangsung dari tanggal 8 s/d 10 April 2026, dilaksanakan khususnya di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rangkasbitung, Cihara, dan Cigemblong, yang dikenal sebagai wilayah dengan potensi produksi padi cukup besar. *Groundcheck* ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data yang dihimpun melalui sistem pemantauan berbasis teknologi dengan kondisi riil di lapangan.

SIMOTANDI (Sistem Monitoring Tanam Padi) menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau perkembangan fase tanam, luas tanam, hingga potensi panen secara lebih cepat dan akurat. Namun demikian, validasi lapangan tetap diperlukan guna menjamin kualitas data yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaan *groundcheck*, tim Pusdatin khususnya kelompok kerja data komoditas yang dibagi menjadi 2 tim di sebar ke beberapa desa di 3 kecamatan tersebut untuk melakukan observasi langsung terhadap kondisi pertanaman padi di lokasi yang telah ditentukan. Kegiatan ini meliputi identifikasi fase pertumbuhan tanaman, pengukuran luas lahan, serta pencocokan data dengan hasil pemantauan berbasis citra dan laporan administratif. Selain itu, tim juga berdialog dengan petani setempat untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pertanian di wilayah tersebut.



Hanny Muliary (Pusdatin) sedang wawancara petani (Poktan Cipendeuy), Kecamatan Rangkasbitung

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar data yang tercatat dalam sistem telah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Hal ini menjadi indikator positif bahwa pemanfaatan teknologi dalam pemantauan pertanian semakin dapat diandalkan. Meski demikian, ditemukan pula beberapa perbedaan minor yang menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem ke depan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai validasi data, tetapi juga sebagai sarana koordinasi antara

pemerintah pusat dan daerah. Sinergi antara berbagai pihak, mulai dari petugas lapangan, dinas pertanian daerah, hingga petani, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan data pertanian yang akurat dan terpercaya. Lebih jauh, *groundcheck* SIMOTANDI ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Pertanian dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Dengan data yang valid dan terintegrasi, perencanaan produksi, distribusi, hingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Kabupaten Lebak sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung produksi padi di Provinsi Banten. Oleh karena itu, kegiatan verifikasi seperti ini diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di wilayah ini tetapi juga di daerah-daerah sentra produksi lainnya di Indonesia. Melalui langkah nyata seperti *groundcheck* SIMOTANDI, Kementerian Pertanian menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem pertanian yang modern, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Dengan kolaborasi yang kuat serta pemanfaatan teknologi yang optimal, target swasembada pangan bukan lagi sekadar wacana, melainkan tujuan yang semakin dekat untuk diwujudkan.

Hasil Verifikasi dan Analisis di Kecamatan Rangkasbitung

- a. Kecamatan Rangkasbitung terdiri dari 16 desa dengan topografi dataran rendah (ketinggian < 40 dpl), merupakan salah satu wilayah dengan infrastruktur pertanian yang relatif baik di Kabupaten Lebak. Sistem irigasi yang cukup memadai memungkinkan petani melakukan penanaman secara lebih teratur. Lokasi desa yang dikunjungi untuk foto geotaging yaitu Rangkasbitung Barat, Rangkasbitung Timur, Jatimulya, Careng, Kolelet wetan, Pabuaran, Pasir Tanjung.
- b. Pada periode pengamatan 26 Maret – 6 April 2026, sebagian besar lahan berada pada fase vegetatif hingga awal generatif. Hasil verifikasi menunjukkan tingkat kesesuaian data yang tinggi antara SIMOTANDI dan kondisi lapangan
- c. Tingkat Akurasi Data Simontadi dengan Kondisi Riil di Lapangan. Hasil visualisasi di lapangan di kecamatan Rangkasbitung dengan SIMOTANDI periode 26 Maret 2026

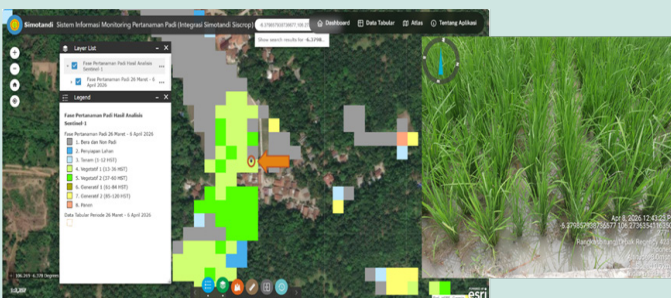
sampai dengan 6 April 2026 menunjukkan ada sebagian data amatan/kunjungan ke lapang pada tanggal 8 April 2026 tidak sesuai dengan fase di SIMOTANDI. Akurasi dari perbedaan dilapangan menunjukkan 23 atau 33,34% amatan sudah sesuai/sama antara fase di lapangan dengan SIMOTANDI, sementara sisanya 44 amatan menunjukkan perbedaan fase.

- d. Varietas Padi yang digunakan. Penggunaan varietas padi di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menunjukkan dinamika yang cukup beragam dan mencerminkan upaya petani dalam menyesuaikan pilihan varietas dengan kondisi agroekosistem setempat serta kebutuhan produksi. Secara umum, varietas padi yang digunakan didominasi oleh varietas unggul baru (VUB) yang telah dilepas oleh pemerintah, seperti Inpari (Inpari 32, Inpari 42, Inpari Nutri Zink) dan Ciherang, yang dikenal memiliki produktivitas tinggi, umur genjah, serta relatif tahan terhadap hama dan penyakit tertentu.. Umur panen varietas Inpari $\pm 100 - 120$ hari setelah tanam (HST), sedangkan umur panen Ciherang $\pm 110 - 120$ hari setelah tanam (HST).

Varietas Inpari dan Ciherang masih menjadi pilihan utama petani di wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan benih yang relatif mudah diperoleh, baik melalui bantuan pemerintah maupun dari penangkar lokal, serta sudah terbukti adaptif terhadap kondisi lahan sawah irigasi maupun tadah hujan yang banyak dijumpai di Rangkasbitung. Selain itu, karakteristik rasa nasi yang pulen dari varietas tersebut juga sesuai dengan preferensi konsumen di wilayah Banten, sehingga memiliki nilai jual yang stabil di pasar.

Hasil Verifikasi dan Analisis di Kecamatan Cihara

- Kecamatan Cihara terdiri dari 9 desa yaitu : Pondok Panjang, Ciparahu, Cihara, Karangmulyan, Panyaungan, Mekarsari, Lebak Penduy, Citeupuseun dan Barunai. Karakteristik wilayah menurut letak geografis dengan ketinggian antara 8 dpl hingga 262 dpl, termasuk area pesisir dan bukan pesisir serta lembah/DAS, lereng/bukit. Pengairan termasuk lahan tadah hujan. Menurut data BPS tahun 2025, Kecamatan Cihara, total luas wilayah seluas 144,54 km².
- Kondisi ini menyebabkan variasi fase tanam yang cukup dinamis, fase pertanaman padi didominasi vegetatif 1 atau kondisi 13 hingga 36 Hari setelah tanam (HST).
- Tingkat Akurasi Data Simontadi dengan Kondisi Riil di Lapangan. Hasil amatan di lapangan di kecamatan Cihara dengan SIMOTANDI periode 26 Maret 2026 sampai dengan 6 April 2026 menunjukkan ada sebagian data amatan/kunjungan ke lapang pada tanggal 8 April 2026 tidak sesuai dengan fase di SIMOTANDI. Akurasi dari perbedaan dilapangan menunjukkan 12 atau 37,5% amatan sudah sesuai/sama antara fase di lapangan dengan SIMOTANDI, sementara sisanya 20 amatan menunjukkan perbedaan fase.
- Varietas Padi yang digunakan. Penggunaan varietas padi oleh petani di Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menunjukkan kombinasi antara pemanfaatan varietas unggul modern dan inovasi lokal yang berkembang di tingkat petani. Secara umum, petani di wilayah ini mengikuti tren penggunaan varietas unggul baru (VUB) yang juga berkembang di Kabupaten Lebak, karena memiliki produktivitas tinggi, umur genjah, serta relatif tahan terhadap hama dan cekaman lingkungan. Selain varietas unggul dan varietas hasil inovasi petani, secara historis Kabupaten Lebak juga memiliki varietas lokal yang masih dikenal, meskipun penggunaannya semakin terbatas. Varietas lokal tersebut umumnya yang digunakan oleh petani atau penangkar benih di suatu wilayah msalnya PS 08, umur panen varietas ini menurut petani sekitar 2 bulan atau \pm



Keterangan : Tanggal Survei : 8 April 2026 | Fase Pertanaman : Vegetatif 1 |

Varietas : Ciherang. Kondisi fase pertanaman sudah sesuai dengan pengamatan Simotandi

75 HST. Varietas ini memiliki kesesuaian dengan kondisi agroekosistem lokal (irigasi/tadah hujan), Produktivitas yang cukup baik menurut pengalaman petani, Ketersediaan benih yang mudah diperoleh secara lokal, Karakter gabah atau beras yang sesuai dengan pasar setempat.

Hasil Verifikasi dan Analisis di Kecamatan Cigemblong

- a. Kecamatan Cigemblong adalah salah satu kecamatan di bagian selatan Kabupaten Lebak, Banten, dengan luas wilayah 132,51 km² atau 4,35% dari luas kabupaten. Wilayahnya berjarak sekitar 80 km dari ibukota kabupaten, berbatasan dengan Kecamatan Cihara/Panggarangan (selatan), Cirinten (utara), Cijaku (barat), serta Sobang/Muncang (timur). Kecamatan Cigemblong mempunyai 9 (sembilan) desa. Secara umum, tiga desa terbesar adalah Wangunjaya, Cikadongdong, dan Cikatutaan yang mencakup lebih dari 42% luas Kecamatan Cigemblong. Sementara itu, desa-desa yang lebih kecil seperti Cibungur dan Cikate masing-masing hanya menyumbang sekitar 7%. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam distribusi luas wilayah antar desa, dengan satu desa dominan yang luasnya hampir mencapai 18% dari total kecamatan.
- b. Jadwal penanaman padi di Kecamatan Cigemblong banyak dipengaruhi oleh kebijakan dari kepala adat setempat dan para ulama, sehingga jadwal tanam atau fase penanaman padi semuanya seragam/sama di seluruh wilayah kecamatan.
- c. Tingkat Akurasi Fase Pertanaman Simotandi dengan Kondisi Riil di Lapangan berdasarkan Fase Tanam 26 Maret - 6 April di Kecamatan Cigemblong setelah di verifikasi rata-rata menunjukkan kondisi Tanam hingga Vegetatif 1.
- d. Varietas Padi yang digunakan. Varietas Padi yang digunakan di Wilayah Kecamatan Cigemblong menggunakan Varietas Inpari 32 Banper.

Pelaksanaan ground check SIMOTANDI di Kabupaten Lebak pada periode 26 Maret hingga 6 April 2026 menjadi langkah nyata

dalam memastikan kualitas data pertanian nasional. Melalui kegiatan ini, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan sistem pertanian yang modern, transparan, dan berbasis data.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi yang terus berkembang, target swasembada pangan bukan hanya menjadi harapan, tetapi sebuah tujuan yang semakin dekat untuk diwujudkan

Penulis: Suyati



satudata.pertanian.go.id